

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Putusan Nomor 1318 Pk/Pid.sus/2023)

Penelitian ini mengkaji hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 1318 PK/Pid.Sus/2023. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih maraknya kasus perdagangan orang di Indonesia meskipun telah ada regulasi yang mengatur dan menindak tegas pelakunya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk mengungkap bagaimana sistem peradilan di Indonesia menerapkan hukuman terhadap pelaku perdagangan orang serta faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim. Studi kasus yang dianalisis melibatkan seorang terpidana yang divonis bersalah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 48 dan Pasal 4 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terpidana dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara, denda Rp120.000.000,00, serta kewajiban membayar restitusi kepada korban sebesar Rp117.000.000,00. Permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana ditolak oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa bukti baru yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai novum yang dapat mengubah putusan. Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah jelas mengatur hukuman bagi pelaku, tantangan dalam penerapan hukum masih ada, terutama dalam hal pemberian efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku perdagangan orang. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas hukuman serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan orang secara lebih optimal.

Kata kunci :sanksi pidana, kasus perdagangan orang

ABSTRACT
JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING FOR PERPETRATORS OF
HUMAN TRAFFICKING CRIMES
(Case Study of Decision Number 1318 PK/Pid.Sus/2023)

This study examines the sentencing of perpetrators of human trafficking in the Supreme Court Decision No. 1318 PK/Pid.Sus/2023. The background of this research is based on the persistent prevalence of human trafficking cases in Indonesia despite the existence of regulations that strictly govern and punish the offenders. This study employs a normative juridical approach to reveal how the Indonesian judicial system imposes penalties on human traffickers and the factors influencing judicial decisions. The analyzed case involves a convicted individual found guilty under Article 2(1) in conjunction with Article 48 and Article 4 in conjunction with Article 48 of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking. The convict was sentenced to seven years of imprisonment, a fine of IDR 120,000,000.00, and an obligation to pay restitution to the victim amounting to IDR 117,000,000.00. The petition for judicial review filed by the convict was rejected by the Supreme Court on the grounds that the newly submitted evidence did not meet the criteria as novum capable of altering the final decision. The research analysis indicates that although legal provisions clearly regulate penalties for human traffickers, challenges remain in their implementation, particularly in ensuring a more deterrent effect on offenders. Therefore, this study emphasizes the importance of evaluating the effectiveness of sentencing and enhancing the capacity of law enforcement authorities in handling human trafficking cases more optimally.

Keywords: *criminal sanctions, human trafficking cases*